

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan nasional saat ini sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi sistem, manajemen, dan kurikulum yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Anonim, 2003:14).

Perubahan-perubahan di atas juga menuntut berbagai tugas yang harus dikerjakan oleh para tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, mulai dari level makro sampai dengan level mikro, yaitu tenaga kependidikan di sekolah. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan yang disebut Kepala Sekolah (Anonim, 2005:36).

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu pilar pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. Malahan dapat dikatakan masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada masa kini. Pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang potensial dan profesional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu sekolah merupakan titik sentral dan strategis dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, dinamis, mampu mandiri, dan menjadi proaktif.

Paradigma baru manajemen pendidikan memberikan kewenangan luas kepada kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus siap menerima kewenangan tersebut dengan berbagai konsekuensinya. Di samping itu, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merambah ke sekolah-sekolah, membuat semakin kompleksnya tugas kepala sekolah, bukan sebaliknya. Kepala sekolah tidak lagi dapat menerima suatu perubahan sebagaimana adanya, tetapi harus berpikir untuk membuat perubahan di sekolah. Kunci agar kepala sekolah dan tenaga kependidikan tetap bertahan dan *enjoy* di tengah-tengah perubahan paradigma baru manajemen pendidikan adalah dengan memahami posisi, apa yang sedang terjadi, dan kesiapan untuk menjadi bagian

dari dunia baru yang sangat berbeda. Misalnya dalam manajemen, yang dulu sentralistik, sekarang didesentralisasikan ke sekolah dengan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Oleh karena itu kepala sekolah dituntut memiliki kesiapan mental dalam rangka memahami perubahan yang terjadi dengan segala konsekuensinya. Dengan berbekal kesiapan mental dalam bentuk kecerdasan emosional, kepala sekolah akan bijak dalam memahami segala perubahan yang terjadi.

Paradigma baru manajemen pendidikan dalam konteks MBS dicirikan dengan adanya otonomi pendidikan dan pengambilan keputusan partisipatif. Dalam konteks otonomi pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk dapat mengembangkan sekolahnya secara mandiri. Untuk itu kepala sekolah harus dapat menggerakkan segenap tenaga kependidikan yang dimilikinya untuk bekerja keras dan penuh inovatif mengembangkan sekolahnya. Dengan kata lain, kepala sekolah harus dapat menunjukkan komitmen organisasi dan juga keinovatifannya dalam mengelola sekolahnya. Sedangkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin, kepala sekolah dapat mengembangkan pengambilan keputusan partisipatif, artinya kepala sekolah bersama-sama dengan warga sekolah yang lain mengambil keputusan bersama dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu,

pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Kedudukan komite sekolah berada di satu satuan pendidikan baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Ia merupakan institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama.

Komite sekolah merupakan nama generik. Artinya, bisa diubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nama seperti majelis sekolah bisa dipakai, asal esensinya dari komite sekolah tidak ditinggalkan.

Selain dimaksudkan agar muncul suatu organisasi masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyal serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, secara tegas pemerintah menetapkan beberapa tujuan mengapa komite sekolah perlu dibentuk. *Pertama*, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. *Kedua*, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Serta ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Komite sekolah juga memainkan peran pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan

pendidikan. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsi yang dijalankannya;

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan ;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan ;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Anggota Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Termasuk dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, serta badan pertimbangan pendidikan yang mempunyai jatah paling banyak tiga orang. Komite sekolah sendiri sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang dan jumlahnya harus gasal.

Pembentukan komite sekolah wajib dilakukan dengan demokratis, diumumkan secara terbuka, dan diketahui masyarakat luas. Transparansi dimulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, pengumumannya, pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Laporan pertanggungjawaban panitia pun mesti jelas.

Seiring dengan tuntutan era global, desentralisasi pendidikan, dan otonomi pendidikan di sekolah maka peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional yang merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002 (Mulyasa, 2009 :31). Lebih fokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003:3). Melalui payung Undang-Undang ini, paradigma baru manajemen pendidikan mulai bergulir.

Paradigma baru manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan atau solusi alternatif dalam penanggulangan masalah pendidikan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang diharapkan dapat mengantisipasi masalah pengangguran dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Salah satu indikator keberhasilan SMK adalah peningkatan mutu lulusan dan kualitas tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah, guru, teknisi/laboran, tenaga administrasi, yang secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pendidikan di SMK (Anonim, 2008:12).

Kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut adanya penyesuaian dan pengembangan profesional untuk dapat mengembangkan dan mengelola lembaga pendidikan di sekolah khususnya terdapatnya sinergi yang baik antara sekolah dengan komite sekolah sebagai penyambung lidah antara

Tenaga pendidik disekolah dan orang tua melalui perwakilannya di sekolah yaitu Komite Sekolah.

Sejalan dengan hal ini, budaya kepemimpinan komite sekolah merupakan salah satu rangkaian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga pendidik maupun kependidikan yang melaksanakan secara langsung pengelolaan kegiatan pembelajaran disekolah melalui kepemimpinan komite sekolah yang baik akan dapat meningkat kualitas pengelolaan pendidikan di sekolah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka fokus pada penelitian ini adalah “bagaimana karakteristik kepemimpinan komite sekolah : studi situs di SMK Muhammadiyah 1 Klaten.” Fokus penelitian dijabarkan menjadi tiga sub fokus.

1. Bagaimana kepemimpinan komite sekolah dalam menyusun rencana program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten?
2. Bagaimana kepemimpinan komite sekolah dalam mengawasi pelaksanaan program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten?
3. Bagaimana kepemimpinan komite sekolah dalam mengevaluasi program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus dan sub fokus penelitian maka tujuan penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kepemimpinan komite sekolah dalam menyusun rencana program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten.
2. Mendeskripsikan kepemimpinan komite sekolah dalam mengawasi pelaksanaan program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten.
3. Mendeskripsikan kepemimpinan komite sekolah dalam mengevaluasi program kerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Proses dan hasil penelitian ini dapat merupakan pengembangan penelitian kepemimpinan komite sekolah yang mempunyai peran dan fungsi meningkatkan keikutsertaan masyarakat, khususnya peran dan fungsi komite sekolah.

2. Manfaat praktis

- a. Bahan masukan kepada Dewan Pendidikan dalam rangka pembinaan terhadap komite sekolah berkaitan dengan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator di satuan pendidikan.
- b. Bahan masukan kepada kepala sekolah dalam rangka peningkatan fungsi manajemen berkaitan dengan kerjasamanya dengan komite sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Kepemimpinan komite sekolah

Kepemimpinan komite sekolah adalah tindakan/ kegiatan suatu organisasi di sekolah dalam menjalankan tugasnya berkenaan dengan perannya dalam memajukan satuan pendidikan, sebagai penyambung lidah antara pihak sekolah dengan orang tua/wali peserta didik, bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah, seperti tertuang dalam Kepmendiknas No 044/U/2002.

2. Penyusunan Rencana Program Kerja Sekolah

Penyusunan rencana program kerja sekolah merupakan proses yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan sekolah.

3. Pengawasan Program Kerja Sekolah

Pengawasan program kerja sekolah adalah rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari penyusunan program kerja sekolah.

4. Evaluasi Program Kerja Sekolah

Evaluasi program kerja sekolah adalah suatu proses untuk melihat dan menganalisa laporan-laporan dari pelaksanaan program kerja sekolah, kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.